

**PENGELOLAAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) MINAGATES DI TEMPAT
PELELANGAN IKAN (TPI)
(Studi Kasus : Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota
Padang)**

Tarmizi Bayur¹, Firman²

Program Pascasarjana Magister Pendidikan Universitas Negeri Padang, Indonesia

Email: bayurmizi93@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah informan 13 orang. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah observasi non-partisipan, wawancara mendalam dan studi dokumen sedangkan unit analisis data yang digunakan oleh kelompok dengan menggunakan Milles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) seperti: 1) sistem kelembagaan Koperasi yang tidak berdasarkan pada ART, 2) rendahnya partisipasi anggota koperasi, 3) unit bisnis tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Koperasi Unit Desa, Tempat Pelelangan Ikan

Abstract

This research used qualitative research and the design is descriptive research. This research use purposive sampling technique with the number of informants are 13 peoples. The type of data is primary data and secondary data. The method of gathering data are not-participant observation, depth interview and document study while the data analysis unit that used by the group by using Milles and Huberman. Based on the result of the research, it can be concluded that there are several factors causing decreasing of Village (Koperasi Unit Desa/KUD) MINAGATES management such as: 1) the system of Cooperative Institution not based on the ART, 2) low of participation in cooperation members, 3) the business unit not working properly.

Keywords: *Agency, Management, Cooperation*

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi melalui usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan-badan usaha atau pelaku kegiatan ekonomi yang lebih mengutamakan modal. Dengan demikian koperasi harus dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi rakyat yang mandiri pertumbuhannya berakar didalam masyarakat dan lebih ditingkatkan kesadaran, kegairahan, kemampuan masyarakat untuk berkoperasi melalui penyuluhan dan pembinaan pengelolaan koperasi (Ninik, 2008:3-5).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang perekonomian, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Hendar, 2005:18).

Sebagai badan usaha, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota sertamenghadapi persaingan di

dalam pasar, maka koperasi harus mampu bekerja efisien mengikuti prinsi-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.(Hendar, 2005:246).

Tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi adalah tujuan ekonomi atau dengan lain perkataan bahwa koperasi harus bekerja berdasarkan motif ekonomi, sedangkan komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi. Sedangkan unsur sosial dapat pula ditemukan dalam cara kerja koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk, persaudaraan dan kesatuan, juga untuk hubungan antara sesama anggota dan pengurus (Handrojogi, 2007:25).

Sesungguhnya Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai wadah pusat pelayan kegiatan perekonomian pedesaan harus didirikan serta dikembangkan dengan perhitungan dan pertimbangan ekonomis yang membutuhkan pemikiran yang jauh ke masa depan. KUD harus pula melibatkan daya pikir masyarakat. Selain itu untuk memajukan dan mengembangkan KUD sangat dibutuhkan tenaga pimpinan (Pengurusan Manajer Pengelola Koperasi) yang ahli, mempunyai pengetahuan tentang ilmu ekonomi, berwatak terampil dan mempunyai peran penting di dalam sebuah Koperasi (Ninik, 2008:64-65).

Pentingnya peran koperasi bagi anggota koperasi pada daerah Gaung, Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, memang sangat diperlukan.Terdapat KUD MINAGATES Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bagi nelayan yang berada di tempat tersebut. Hubungan antara koperasi dengan nelayan di TPI sangat perlu dan saling berperan untuk kelancaran nelayan dalam beroperasi dalam menangkap ikan di laut, untuk itu perlu peran koperasi dalam memberikan bantuan dan menyediakan keperluan nelayan (Ariesta, 2016:95).

Dalam sosiologi ekonomi, melihat adanya suatu pola hubungan atau interaksi yang terorganisir dalam suatu ruang sosial, karena didalamnya terdapat struktur yang terorganisir seperti ketua, sekretaris dan anggota, kemudian anggaran dasar dan rumah tangga.Struktur merupakan tuntunan dalam sebuah interaksi, bagaimana membantu hubungan yang lebih baik dalam sebuah keorganisasian karena sebuah struktur menyadarkan bahwa hidup dicirikan dengan pergorganisasian dan stabil. Maka struktur dalam lembaga koperasi harus di lebih ditingkatkan dan diperkokoh, dengan meningkatkan hubungan interaksi sosialnya (Damsar, 2009:149).

Usaha KUD dibentuk berdasarkan kebutuhan pelayanan kepada anggota seperti usaha simpan pinjam, sarana-sarana pertanian atau perikanan, memasarkan produksi anggota dan lain- lainnya. Salah satunya kud minagates sebagai wadah pusat pelayanan bagi anggota koperasi sendiri yang sebagian berprofesi sebagai nelayan dan pedagang ikan dan hubungan didalam struktur ke organisasian baik pengurus inti maupun anggota koperasi sendiri yang harus berinteraksi secara terbuka satu sama lain, supaya mensejahterakan anggota koperasi sendiri.

Semasa kepengurusan kud minagates oleh H. Azwin (ketua koperasi) dan Waliadi, SE (sekretaris koperasi) pada tahun 1994 sampai 2007 mendapatkan reword 1 milyar dari aggrri bisnis Menteri Koperasi RI Marwan Hanam pada tahun 2004, berarti ada kepedulian dari pemerintah pada saat itu yang mana menteri datang langsung meninjau ke lokasi TPI Koperasi Unit Desa (Kud) Minagates). Koperasi juga melayani beberapa usaha (program) bagi masyarakat nelayan, sebagai berikut:1. WASERDA (Warung Serba Ada),2.Penagihan listrik (kerjasamadengan PLN), 3.Penjualan es batu (Pendingin), 4.Simpan pinjam (Berbentuk Uang), 5.Restribusi, 6.Layanan komunikas(*Sumber: Wawancara dengan Sekretaris koperasi periode (2004-2007)*)

Semua jenis kegiatan koperasi berjalan dengan baik karena hubungan antara petugas koperasi saling terbuka satu sama lain, untuk itu layanan dari koperasi untuk anggota koperasi bisa dirasakan langsung oleh anggota koerasi di tempat pelelangan ikan (TPI) terutama anggota koperasi sendiri. Sekali satu tahun koperasi mengadakan rapat anggota untuk membahas pekerjaan selama satu tahun terakhir baik keluhan atau

masukannya bagi kepentingan koperasi sendiri dan menyepakati program-program untuk dijalankan berikutnya dalam Koperasi Minagates.

Berdasarkan observasi di Kud Minagates Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang pada tanggal 29-30 November 2017 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, tata kelola koperasi yang tidak sesuai dengan ART disebabkan tidak adanya berfungsi tugas masing-masing pengurus, pengawas, dan anggota koperasi yang sudah tertera didalam ART. *Kedua*, Kud Minagates yang berada di TPI Gaung sudah tidak berjalan dengan normal lagi, sehingga kelangsungan keperluan koperasi tidak terakomodir dengan baik. *Ketiga*, unit usaha yang tidak berjalan dengan semestinya disebabkan pembayaran yang sudah mulai macet dari anggota kepada pengurus koperasi yang sekaligus pengelola usaha. Kemudian berdasarkan masalah diatas sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Menurunnya Pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) MINAGATES di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Studi Kasus : Pengelolaan KUD MINAGATES, Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang)”**

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan penelitian dengan menggunakan *proposive sampling* (penunjukkan). Adapun informan penelitian dalam penelitian ini berjumlah 16 orang orang. Analisis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, (Sugiyono, 2012:246-252).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan KUD MINAGATES

Pelaksanaan Tidak Sesuai dengan Prinsip Koperasi.

Prinsip koperasi adalah sebagai berikut: *Pertama*, pengelolaan dilakukan secara demokratis. *Kedua*, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) adil dan sebanding dengan peran. *Ketiga*, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. *Keempat*, kemandirian. *Kelima*, pendidikan perkoperasian. *Keenam*, kerja sama antar koperasi. Sedangkan pada prinsip koperasi yang sebenarnya dilaksanakan secara demokratis dengan saling keterbukaan, hubungan, dan kepedulian satu sama lain baik pengurus inti maupun anggota koperasi bisa berjalan dengan baik untuk kemajuan pengelolaan koperasi sendiri dan dikendalikan oleh para anggota secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan-keputusan.

Rober K.Marton mengatakan bahwa sistem yang baik di dukung oleh subsistem yang positif, seperti dilapangan koperasi termasuk kedalam sebuah sistem dimana susbsitemyan menyumbangkan keharmonisan pada sistem itu sendiri, tetapi di kepengurusan KUD tidak lagi menyumbangkan subsistem dalam sistem koperasi yang menyebabkan terjadinya disfungsi yang berarti adanya tekanan, kekhawatiran, ketegangan pada aspek struktural, memberikan suatu pendekatan analisis terhadap dinamika dan perubahan.

Tidak adanya berjalan prinsip-prinsip koperasi didalam KUD MINAGATES menyebabkan koperasi tidak berjalan dengan fungsi tugas yang seharusnya dijalankan oleh antar pengurus inti di KUD MINAGATES, pengurus inti yang sibuk dengan urusan masing – masing sehingga tidak berjalannya program-program dan fungsi tugas pengurus, dan pengawas.

Penurunan Partisipasi Anggota Koperasi

Partisipasi dapat diartikan sebagai sebuah keterlibatan seseorang dalam sebuah proses tertentu. Partisipasi ini memiliki arti penting untuk keberlangsungan sebuah proses pembangunan (Putra, 2015).

Partisipasi anggota merupakan hal yang vital dalam pembangunan koperasi salah satunya dalam Koperasi Unit Desa (KUD). Dalam realitanya terdapat banyak koperasi dengan tingkat partisipasi anggota yang rendah, namun beberapa diantaranya tetap dapat memberikan manfaat yang memuaskan bagi para anggotanya. Akan tetapi, tanpa partisipasi anggota, kemungkinan atas rendah atau menurunnya efisiensi dan efektivitas anggota dalam rangka mencapai kinerja koperasi untuk lebih besar dalam meningkatkan pengelolaan koperasi.

Partisipasi anggota koperasi dalam RAT sangat diperlukan kesadaran untuk menghadiri RAT tersebut, karena dalam RAT anggota dapat mengemukakan pendapatnya tentang kinerja serta kepengurusan koperasi selama satu periode tertentu. Namun berdasarkan observasi yang peneliti temukan dilapangan tepatnya di KUD MINAGATES partisipasi anggota dalam RAT sangat menurun ini bisa dilihat saat RAT terakhir dilakukan pada 25 Maret 2012, anggota yang jumlahnya 100 orang yang hadir saat itu 54 orang dan yang tidak 46 datang orang, ini bisa dilihat dari daftar hadir rapat anggota koperasi (lihat lampiran 6), bahkan lima tahun terakhir belum ada dilaksanakan ART di Kud Minagates.

Jadi kaitannya dalam penelitian ini adalah konsep disfungsi yang dikemukakan oleh Rober K.Marton bahwa tidak adanya hubungan yang harmonis antara pengurus inti dengan anggota pengurus di Koperasi Unit Desa (KUD) MINAGATES, dapat dilihat dari partisipasi RAT yang sangat menurun terjadi pada 25 maret 2012. Serta kurangnya dukungan dari pengurus dalam melaksanakan rapat dan komunikasi yang tidak berjalan antar pengurus inti dengan anggota, sehingga rendahnya tingkat partisipasi anggota koperasi dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Unit Usaha yang Tidak Berjalan

Koperasi Unit Desa (KUD) MINAGATES yang ada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ini pada umumnya memiliki berbagai unit usaha mulai dari simpan pinjam dan WASERDA. Unit usaha yang ada di koperasi sangat dirasakan manfaatnya bagi anggota, karena tujuan unit usaha ini untuk mempermudah anggota koperasi untuk kebutuhan usahanya di TPI. Anggota bisa meminjam modal ke koperasi untuk dipergunakan dalam berbagai usaha, setelah itu anggota koperasi membayar sekali satu bulan kepada koperasi.

lima tahun yang lalu unit usaha yang dimiliki KUD awalnya berjalan baik dan lancar, kemudian mengalami penurunan bahkan tidak ada lagi berjalan sampai saat ini, karena anggota koperasi mulai macet dari segi pembayaran peminjaman kepada koperasi, banyak anggota yang tidak membayar karena berbagai keluhan anggota, mulai dari tidak ada pemasukan, cuaca tidak baik makanya hasil tangkapan tidak banyak. Makanya pengurus koperasi memberhentikan unit usaha simpan pinjam dan WASERDA di KUD MINAGATES.

Jadi kaitannya antara konsep disfungsi yang dikemukakan oleh Rober K.Marton dengan penelitian yang dilakukan adalah, bahwa terdapatnya ketegangan dan kekhawatiran dalam melaksanakan unit usaha di Koperasi Unit Desa (KUD). Berdasarkan data yang diperoleh peneliti unit analisis tidak berjalan dapat dilihat dari segi pembayaran anggota kepada Koperasi Unit Desa yang macet. Maka pengurus koperasi mengambil langkah untuk tidak lagi menjalankan unit usaha di koperasi, supaya tidak mengalami kerugian. Dari data tersebutlah terjadinya disfungsi pada koperasi KUD MINAGATES yang menyebabkan tidak harmonisnya sistem tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Menurunnya Pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) MINAGATES di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam lima tahun terakhir ini mengalami penurunan, sehingga Koperasi Unit Desa (KUD) MINAGATES mengalami penurunan dari segi unit usaha, Rapat Anggota

- Tahunan (RAT) yang tidak berjalan lagi, dan partisipasi anggota yang sudah mulai menurun dalam mengikuti kegiatan koperasi.
2. Kurangnya hubungan antara pengurus dan pengawas dengan anggota, ini disebabkan peran penting pengurus di Koperasi Unit Desa (KUD) tidak berjalan lagi, makanya anggota tidak merasakan layanan dari pengurus inti..
 3. Rendahnya tingkat partisipasi bisa dilihat dari anggota koperasi yang kurang memiliki partisipasi untuk keikutsertaan terhadap kegiatan yang dilakukan koperasi dalam pengelolaan koperasi sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Dari Penelitian Sampai Penulisan Laporan*. Unand: Laboratorium Sosiologi Fisip Unand.
- Arikunto, S. (2010). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Ariesta, S. R. dan I. (2016). Pola jaringan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pasar Ikan Gaung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. *Imul Sosial Mamangan*, 5. <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/jurnal-mamangan/article/view/1323>
- Azannsyah. (2013). Peran Kelembagaan Dalam Perekonomian, Kondisi Pembangunan Kelembagaan Di Indonesia, Dan Membangun Lembaga yang Efektif. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, VII <http://downloadportalgaruda.org/article.php?article=397996&fal=8717&title=peran%20kelembagaan%20dalam%20perekonomian>.
- Damsar. (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT. Prenada Media Group.
- Depdiknas. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Handrojogi. (2007). *Koperasi (Azas-Azas, Teori dan Praktik)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hendar, K. dan. (2005). *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Maleong, Ixey. j. (2010). *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: remaja rosdakarya.
- Ninik, S. dan. (2008). *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Putra, I. M. (2015). Partisipasi Semu Perempuan Miskin dalam Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender Kafaah*, 5(1), 41–59. Retrieved from <http://www.kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/113>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yustika, E. A. (2012). *Ekonomi Kelembagaan*. Jakarta: Erlangga.